



**Butir-Butir Bahasan terhadap Makalah :
POTRET KEHUTANAN INDONESIA ABAD 21 :
Pengelolaan Hutan Berbasis IPTEK**

Dudung Darusman

(Guru Besar Madya dan Kepala Lab. Poleksos Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB)

***Disampaikan pada Seminar Nasional Perspektif Pembangunan Pertanian dan
Kehutanan Tahun 2001 Ke Depan,
diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
tanggal 9 – 10 Nopember 2000 di Bogor***

Makalah dengan judul di atas yang disusun oleh Dr. Erwidodo dan Dr. Doddy S. Sukadri sangat baik dan penting untuk menjadi acuan kemana kehutanan akan berjalan di Abad 21, agar tidak salah arah. Dengan maksud memperkuat dan menyempurnakan makalah tersebut, berikut ini disampaikan beberapa butir bahasan, yang didahului butir bahasan yang bersifat umum dan mendasar, kemudian diikuti bahasan yang spesifik pada substansi makalah.

1. Gambaran pembangunan kehutanan di Abad 21 pada makalah tersebut di atas tampaknya disusun atas dasar perkembangan dan akumulasi permasalahan dan tantangan yang berkembang selama ini, baik internal maupun eksternal, namun belum diturunkan melalui *pendekatan konseptual*. Pendekatan konseptual yang dimaksud, misalnya pendekatan yang dimulai dengan pengenalan seluruh potensi nilai kesejahteraan yang dikandung sumberdaya hutan di satu sisi, dan target kesejahteraan yang diinginkan oleh Bangsa Indonesia pada sisi yang lain, serta kemudian bagaimana menyambungkannya. Sebaiknya Abad 21, dengan rentang 100 tahun, dianggap sebagai buku baru, dengan saldo yang tersisa dari Abad 20.
2. Bila ada ungkapan “ dari sini ke sana”, maka ungkapan itu mengandung arti pindah ke sana dengan meninggalkan sini. Ungkapan seperti itu sepenuhnya mengisi Bab III, yang merupakan inti makalah tersebut di atas. Dalam kenyataannya, keragaman adalah ciri universal, baik kondisi SDA, SDM, dan sumberdaya-sumberdaya lainnya. Oleh karena itu bidang garapan, target sasaran, keberpihakan, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya seharusnya setiap saat/periode tidak berat ke satu hal saja, tetapi harus ke banyak hal agar dapat menampung dan memberi kesempatan kepada keragaman yang selalu ada tersebut di atas. Alasan perlunya fokus dan prioritas, hanya berlaku bagi mereka yang menganggap bahwa pembangunan itu harus selalu didorong, bahkan dilaksanakan oleh Pemerintah. *Pola berpikir ayunan pendulum*, yang seringkali menciptakan pertentangan dan dualisme, sebaiknya dikembangkan menjadi *pola berpikir majemuk*, yang memperkaya (*enrich*) yang telah ada. Apa yang telah

ada seringkali bukan salah tapi belum/tidak cukup, buktinya di setiap kebijaksanaan selalu ada warga bangsa ini yang diuntungkan, tapi belum memberi keuntungan kepada mereka yang dirugikan.

Selanjutnya disampaikan butir bahasan yang bersifat spesifik pada substansi makalah, sebagai berikut :

1. Butir 4. pada makalah menekankan perlunya kadar iptek yang tinggi dalam pengelolaan hutan. Hal ini perlu dipertegas bahwa kadar iptek yang tinggi di kehutanan tidak cenderung mengandung arti semakin “memanipulasi”, tapi semakin *menanggung manfaat dari perilaku alam*. Apabila demikian, adalah mungkin kadar iptek yang tinggi justru telah diterapkan oleh Suku Dayak dan suku-suku lainnya di pedalaman.
2. Butir 10. dengan jelas menyatakan bahwa inefisiensi di kehutanan lebih disebabkan oleh kesalahan kebijaksanaan daripada “*market failures*”. Perlu ditegaskan bahwa yang terjadi di kehutanan adalah *market yang diacak-acak oleh kebijaksanaan*, jadi berfungsipun tidak, bahkan pada masa jayanya konglomerasi, pasar kayu bulat dapat dianggap tidak ada.
3. Butir 55. juga cukup jelas mengemukakan peran IPTEK di kehutanan. Perlu ditegaskan lagi bahwa nasib IPTEK di kehutanan sesungguhnya sama seperti nasib *market* di atas, ada dan memadai tapi tidak diterapkan karena kebijaksanaan (kelembagaan) yang ada tidak memberi *insentif* untuk penerapannya. Misalnya, buat apa menerapkan “*low impact logging*” kalau tidak ada kepastian hak terhadap tegakan sisa, dan kalau masih menghitung IHH dan DR berdasarkan kayu bulat di pintu pabrik, bukan di hutan. Selanjutnya buat apa mengefisienkan pabrik kalau kayu bulat di pintu pabrik dihitung berdasarkan produksi kayu olahan dikalikan rendemen tertentu yang masih tetap rendah. Jadi kalau IPTEK ingin diterapkan dan ditingkatkan di kehutanan, langkah pertama adalah membenahi kebijaksanaan/kelembagaannya.
4. Kehutanan Abad 21 diharapkan bercirikan *peran serta berbagai lapisan masyarakat dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan*, baik sebagai pengusaha, pemegang saham, pimpinan/pengurus perusahaan, pemborong pekerjaan, maupun sebagai tenaga kerja/buruh, baik pada usaha pokok kehutanan, usaha penyedia input, maupun usaha pengguna/pengolah output, baik pada hutan produksi, hutan lindung, hutan wisata, maupun hutan suaka alam, dst-dst.

Demikianlah butir-butir bahasan yang dapat disusun dalam waktu yang sangat singkat. Tampaknya banyak sekali substansi yang dicakup dan masing-masing dikemukakan dengan baik pada makalah tersebut. Namun masih belum ditempatkan dalam struktur “rumah kehutanan”, sehingga belum kelihatan keindahan dan keserasiannya satu sama lain.